BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Sejarah Keluarga Berencana

Indonesia adalah satu dari berbagai Negara yang mempunyai penduduk dengan jumlah yang relatif banyak. Pertumbuhan penduduk yang tinggi disiasati dengan beberapa upaya, salah satunya ialah KB atau Keluarga Berencana. Sejarah pun mau tidak mau menjadi sebuah cerita yang menarik untuk diikuti dan di cermati. Sejarah KB menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi pemerintah maupun pasangan keluarga suami istri yang hendak ber-KB.

Memiliki keturunan ialah keinginan bagi setiap pasangan yang sudah terikat secara sah dalam ikatan pernikahan. Tapi apabila jumlah anak yang dimiliki terlalu banyak, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Sejarah KB akhirnya menjadi sebuah informasi yang pasti akan berguna.

KB atau masyarakat Indonesia mengenalnya dengan sebutan Keluarga Berencana adalah upaya pemerintah untuk mengatur angka pertumbuhan masyarakat indonesia. Secara tidak langsung, kehamilan pada setiap wanita indonesia sebisa mungkin bisa diminimalisir dengan alasan tertentu.

Sejarah mengenai apa itu KB atau Keluarga Berencana sebenarnya sudah terjadi sudah sejak lama sejarah KB juga secara tidak langsung memiliki hubungan

cerita dengan pencegahan kehamilan yang sudah dilakukan bangsa lain sudah sejak lama. Cara pencegahan dari kehamilan zaman dahulu sepertinya juga ikut melatarbelakangi sejarah KB di Indonesia.

Sejak dahulu manusia, memiliki naluri. Naluri ini terutama dalam hal keinginan untuk melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya. Tentu saja Karena manusia mempunyai hormon seksual yang mendorong dirinya untuk melakukan perkawinan guna mendapatkan keturunan yang bisa melestarikan jenisnya, akan tetapi dibalik keinginan manusia untuk melakukan perkawinan, ternyata tidak selalu diimbangi dengan kesiapan untuk memiliki anak hal ini mendesak manusia untuk mencari cara agar pada saat melakukan perkawinan, tidak berpotensi untuk terjadi kehamilan dan melahirkan.

Cara ini kemudian disebut dengan kontrasepsi. Kebutuhan manusia akan sebuah alat yang menahan laju pertumbuhan penduduk, menjadi awal mula terciptanya mengenai sejarah KB. Sejarah KB dimulai sejak zaman dahulu berbagai cara untuk mencegah kehamilan sudah banyak dilakukan. Konon, salah satu cara tersebut dengan menggunakan teknik *coitus interuptus* (melakukan ejakulasi di luar alat kelamin wanita.

Cerita mengenai KB tidak lepas dari carita-cerita tentang kesuburan wanita itu sendiri. Prinsip kesuburan wanita selama masa ovulasi (pelepasan sel telur) sudah ada sejak zaman yunani kuno pada abab ke-2 Masehi. Saat itu, seorang ahli medis

soranus, menyebutkan bahwa kehamilan akan terjadi pada saat wanita mengalami masa subur.

Masa subur tersebut terjadi pada saat ovulasi, namun soranus keliru dengan pendapatnya tentang masa ovulasi yang terjadi pada saat wanita menstruasi. Jadi pada saat itu wanita menghindari kehamilan disaat menstruasi saja. Dan tentu saja kehamilan tetap akan terjadi. Karena ketidaktahuan terhadap pengetahuan, pendapat soranus tentang masa ovulasi yang terjadi pada saat wanita sedang menstruasi tetap ada sampai 1930. Pendapat para ahli ini mengiringi cerita perjalan sejarah mengenai KB.

Kemudian perjalanan panjang sejarah KB tersebut menggiring kepada metoda-metoda kontrasepsi secara tradisional khususnya Indonesia pada zaman dahulu mempercayai dengan penggunaan minyak zaitun, bubuk delima, jahe bahkan hingga jus tembakau yang dilumurkan disekitar alat kelamin banyak dipercaya sebagai alat ampuh dalam mencegah terjadinya kehamilan. Cerita yang salah mengenai pencegahan kehamilan, atau sebut saja KB juga terdiri dari berbagai minyak, biji, hingga sayur–sayuran dianggap sebuah alat kontrasepsi.

Program Keluarga Berencana atau KB ini, memang menjadi suatu aspek yang selalu diperhatikan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional, mengingat laju angka pertumbuhan penduduk di Indonesia tergolong signifikan pesat dalam pertumbuhannya, hal ini yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan munculnya

kemunduran dari handalnya SDM (Sumber Daya Manusia), serta kehilangan ketahanan keluarga yang unggul, hingga laju kependudukan yang tidak terkontrol.

Keluarga Berencana sendiri merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengontrol laju pertumbuhan yang semakin hari semakin bertambah dan tidak terkontrol secara baik, hal ini yang memicu terjadinya hal– hal yang tidak diinginkan oleh negara. Luas negara yang tidak bertambah sedangkan pertumbuhan penduduk yang terus menerus bertambah, hal ini dapat memicu ketidakidealan dari segi fluktuasi pertumbuhan penduduk, hingga permasalahan ketidakmerataan penduduk di Indonesia, dan munculnya permasalahan–permasalahan kesejahteraan kependudukan, mulai dari masalah sosial ekonomi, pendidikan, hingga permasalahan lapangan pekerjaan yang semakin sulit untuk didapat.

Sedangkan pengertian KB itu sendiri, antara lain, KB yaitu membatasi jumlah anak, hanya dua, tiga dan lainnya. Keluarga Berencana yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (mashlahat) keluarga, masyarakat maupun negara.

Melihat dari konteksnya bahwa KB sendiri, untuk sekarang ini bukan saja dianggap suatu hal yang sifatnya tidak memberikan suatu manfaat yang lebih, seperti orang tua pada waktu terdahulu yang menganggap bahwa mempunyai anak banyak, banyak rezeki tetapi lain halnya untuk sekarang ini, bahwa mempunyai banyak anak

tanpa ada persiapan dari para orangtua tanpa memperhatikan segi ekonomi dan pendidikan, menjadi suatu beban yang memungkinkan untuk terjadinya kesenjangan sosial dan memberikan dampak pada ketahanan dan keutuhan keluarga.

Hal ini tentu saja memang dipengaruhi dari makin meningkatnya persaingan yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya laju penduduk yang menanjak tanpa ada suatu bentuk tindak yang *real* (nyata) dari yang mengemban dalam penekanan angka jumlah penduduk, serta tentunya kesadaran dari pengguna KB itu sendiri bahwa pentingnya menggunakan KB.

Berdasarkan sumber kependudukan Kabupaten Bandung bahwa, daearah Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang mempunyai luas yang besarnya hingga 1.762,39 km. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3.174.499 jiwa dan mempunyai kepadatan penduduk hingga 1.723,82 jiwa/km. Hal ini cukup signifikan sekali bahwa jika melihat angka tersebut, pertumbuhan penduduk yang terus menerus bertambah dan akhirnya terjadi jumlah lonjakan penduduk yang tidak terelakan dengan tidak dibarengi kebijakan system yang baik, hal ini akan sangat berdampak pada kurangnya pemerataan penduduk secara ideal, dan munculnya permasalahan–permasalahan sosial yang angkanya terus menerus bertambah.

3.1.1 Pengertian Keluarga Berencana

Gambar 3.1

Keluarga Berencana



Sumber: http//www.bkkbn.go.id

Pengertian program Keluarga Berencana menurut UU No 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP) pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi,

spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional (Depkes,1999).

Sejak pelita V, program KB nasional berubah menjadi gerakan KB nasional yaitu gerakan masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan NKKBS dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. (Sarwono,1999).

A. Tujuan Program KB

Tujuan umum untuk lima tahun kedepan mewujudkan visi dan misi program KB yaitu membangun kembali dan melestarikan pondasi yang kokoh bagi pelaksana program KB di masa mendatang untuk mencapai keluarga berkualitas tahun 2015.

Sedangkan tujuan program KB secara filosofis adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia.
2. Terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

B. Sasaran Pogram KB

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS), yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

3.1.2 Metoda –Metoda Dan Jenis kontarsepsi

A. **Metode Kontrasepsi Hormonal**

Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu kombinasi (mengandung *hormone progesterone* dan *estrogen sinetik* dan yang hanya berisi progesterone saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil dan suntikan atau injeksi. Sedangkan kontrasepsi *hormone* yang berisi *progestron* terdapat pada pil, suntik dan *implant.*

B. **Metode Kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)**

Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu AKDR yang mengandung *hormone (sintetik progestoren*) dan yang tidak mengandung *hormone.*

C. **Metode Kontrasepsi Mantap**

Metode kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam yaitu Metode Operatif Wanita (MOW) dan Metode Operatif Pria (MOP). MOW sering dikenal dengan *tubektomi* karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran tuba atau tuba *falopil* sehingga mencegah pertemuan antara *ovum* dan sperma sedangkan MOP sering dikenal dengan vasektomi yaitu memotong atau mengikat saluran *vas deferens* sehingga cairan sperma tidak diejakulasikan.

D. **Metode Kontrasepsi Sederhana**

Metode kontrasepsi sederhana ini terdiri dari 2 yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain : metode *amenorhoe laktasi* (MAL), *coitus interuptus*, metode kalender, metode *lender srviks* (MOB), Metode suhu basal badan, dan simptotermal yaitu perpaduan antara suhu basal dan *lender servik.* Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat yaitu kondom, *diafragma*, *cup riveks* dan *spermisida.*

E. **IUD (spiral)**

Fleksibel, alat yang terbuat dari plastik yang dimasukkan ke dalam

rahim dan mencegah kehamilan dengan cara menganggu lingkungan rahim, yang menghalangi terjadinya pembuahan maupun implantasi. Spiral jenis *copper T* (melepaskan tembaga) mencegah kehamilan dengan cara menganggu pergerakan sperma untuk mencapai rongga rahim dan dapat dipakai selama 10 tahun. *Progestasert* IUD (melepaskan *progesteron)* hanya efektif untuk 1 tahun dan dapat digunakan untuk kontrasepsi darurat. IUD dapat dipasang kapan saja selama periode menstruasi bila wanita tersebut tidak hamil. Untuk wanita setelah melahirkan, pemasangan IUD segera (10 menit setelah pengeluaran plasenta) dapat mencegah mudah copotnya IUD. IUD juga dapat dipasang 4 minggu setelah melahirkan tanpa faktor risiko perforasi (robeknya rahim). Untuk wanita menyusui, IUD dengan progestin sebaiknya tidak dipakai sampai 6 bulan setelah melahirkan. IUD juga dapat dipasang segera setelah abortus spontan triwulan pertama, tetapi direkomendasikan untuk ditunda sampai involusi komplit setelah triwulan kedua abortus. Setelah IUD dipasang, seorang wanita harus dapat mengecek benang IUD setiap habis menstruasi.

F. **Metode Ritmik**

Metode ritmik adalah metode dimana pasangan suami istri menghindari berhubungan seksual pada siklus subur seorang wanita. Ovulasi (pelepasan sel telur dari indung telur) terjadi 14 hari sebelum menstruasi. Sel telur yang telah dilepaskan hanya bertahan hidup selama 24 jam, tetapi

sperma bisa bertahan selama 3-4 hari setelah melakukan hubungan seksual. Karena itu pembuahan bisa terjadi akibat hubungan seksual yang dilakukan 4 hari sebelum ovulasi.

3.1.3 Sejarah Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

Pada perkembangannya, Keluarga Berencana di Indonesia mengalami beberapa tahapan perkembangan. Diawali dengan periode perintisan dan pelaporan. pada tahun 1957 yaitu dengan Pembatasan kelahiran secara tradisional (penggunaan ramuan, pijet, absistensi atau wisuh atau bilas liang senggama setelah *coitus*). Perkembangan berlanjut dengan *birth control* di daerah Berdiri klinik YKK (Yayasan Kesejahteraan Keluarga) di Yogyakarta. Sedangkan untuk Semarang berdiri klinik BKIA dan mulai terbentuklah PKBI tahun 1963. Sedangkan untuk di Jakarta seorang yang bernama mempunyai andil dalam perjalanan badan kelarga berencana yaitu Prof. Sarwono P, memulai di poliklinik bagian kebidanan RSUP. Jawa dan luar pulau Jawa (Bali, Palembang, Medan).

Terbentuknya LKBN (Lembaga Keluarga Berencanan Nasional) yang mempunyai tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat. Bermunculan proyek KB sehingga mulai diselenggarakan latihan untuk PLKB (Petugas Lapangan keluarga Berencana). Ada 2 induk organisasi atau badan keluarga berencana yang mempelopori kemunculan organisasi keluarga berencana ini yaitu

PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)

PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Terbentuk tanggal 23 Desember 1957, di jalan Sam Ratulangi No. 29 Jakarta. Atas prakarsa dari dr. Soeharto yang didukung oleh Prof. Sarwono Prawirohardjo, dr. H.M. Judono, dr. Hanifa Wiknjosastro serta Dr. Hurustiati Subandrio. Pelayanan yang diberikan berupa nasehat perkawinan termasuk pemeriksaan kesehatan calon suami-istri, pemeriksaan dan pengobatan kemandulan dalam perkawinan dan pengaturan kehamilan.

BKKBN **(**Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional**)** Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970 tentang pembentukan badan untuk mengelola program KB yang telah dicanangkan sebagai program nasional penanggung jawab umum penyelenggaraan program ada pada presiden dan dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang dibantu dewan pembimbing Keluarga Berencana. Dasar pertimbangan pembentukan BKKBN yaitu :

1) Program keluarga berencana nasional perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber yang tersedia.

2) Program perlu digiatkan pula dengan pengikut sertaan baik masyarakat maupun pemerintah secara maksimal.

3) Program keluarga berencana ini perlu diselenggarakan secara teratur dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. Tugas pokok BKKBN

1) Menjalankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap usaha-usaha pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana.

2) Mengajukan saran-saran kepada pemerintah mengenai pokok kebijaksanaan dan masalah-masalah penyelenggaraan program Keluarga Berencana Nasional.

3) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Keluarga Berencana atas dasar pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

4) Mengadakan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara asing maupun badan-badan internasional dalam bidang keluarga berencana selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5) Mengatur penampungan dan mengawasi penggunaan segala jenis bantuan yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelita I yaitu tahun 1969-1974 daerah program Keluarga Berencana meliputi 6 propinsi yaitu Jawa Bali (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali). Merupakan daerah perintis dari BKKBN. Tahun 1974 muncul program-program integral (*Beyond Family Planning*) dan gagasan tentang fase program pencapaian akseptor aktif. Berdasar Keppres 38 tahun 1978 BKKBN bertambah besar jangkauan programnya tidak terbatas hanya KB tetapi juga program kependudukan. Perkembangan BBKBN dimasa sekarang

Sebelum adanya BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan), lembaga pemerintah ini terlebih dahulu bernama BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Diberlakukannya sistem otonomi daerah pada saat itu turut mempengaruhi perubahan nama tersebut. Adanya pada sebelum diberlakukannya otonomi daerah BKKBN bertugas untuk menjadi sebuah badan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mengkampanyekan program KB dan memonitoring, laju kependudukan yang ada di Indonesia demi terciptanya keluarga yang sejahtera dan menjadikan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul. Pada perkembangannya badan pemerintah yang menanggulangi mengenai keluarga berencana tersebut, mengalami perubahan regulasi sitem yang dibedakan pada dahulu bersifat *vertical*, dimana BKKBN terpacu oleh pusat, pusat sendiri yang menjadi *controlling* BKBPP bertugas seperti demikian namun, tidak menghilangkan fungsi dari BKKBN itu sendiri. artinya disini BKBPP ialah anak dari induk yang bernama BKKBN.

Program KB yaitu Keluarga Berencana, memang sudah ada lama sejak tahun 1970-an, KB (Keluarga Berencana) Merupakan, membatasi jumlah anak, hanya dua, tiga dan lainnya. Keluarga Berencana yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (mashlahat) keluarga, masyarakat maupun negara.

Gambar 3.2

Logo Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional



Sumber : http//www.bkkbn.go.id

3.1.4 Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

3.1.5 Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

Suatu bentuk pernyataan yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk komitmen organisasi. Yaitu sebagai badan yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah dan dipercaya sebagai pemandu aktifitas dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi serta dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tata kerja. Maka dari itu visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. Ialah "Mewujudkan keluarga sejahtera yang maju, mandiri dan berkualitas.

3.1.6 Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

Misi merupakan suatu tujuan yang umumnya bersifat jangka panjang dari sebuah organisasi, pada umumnya sebuah organisasi haruslah memiliki tujuan dari apa yang menjadikan jati diri organisasinya, dan itu dicurahkan ke dalam suatu bentuk misi. Oleh karena itu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. Menuangkan serta merumuskan misinya sesuai dengan tugas, dan fungsinya dan misi itu antara lain :

1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan keluarga sejahtera.
2. Penyediaan Data Mikro Keluarga untuk pembangunan di daerah.

3. Meningkatkan kualitas kepesertaan peserta Keluarga Berencana.
4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penegakan, kesetaraan, keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak.
5. Meningkatkan peran serta swasta atau *stakeholder* dalam pembangunan Keluarga Berencana.

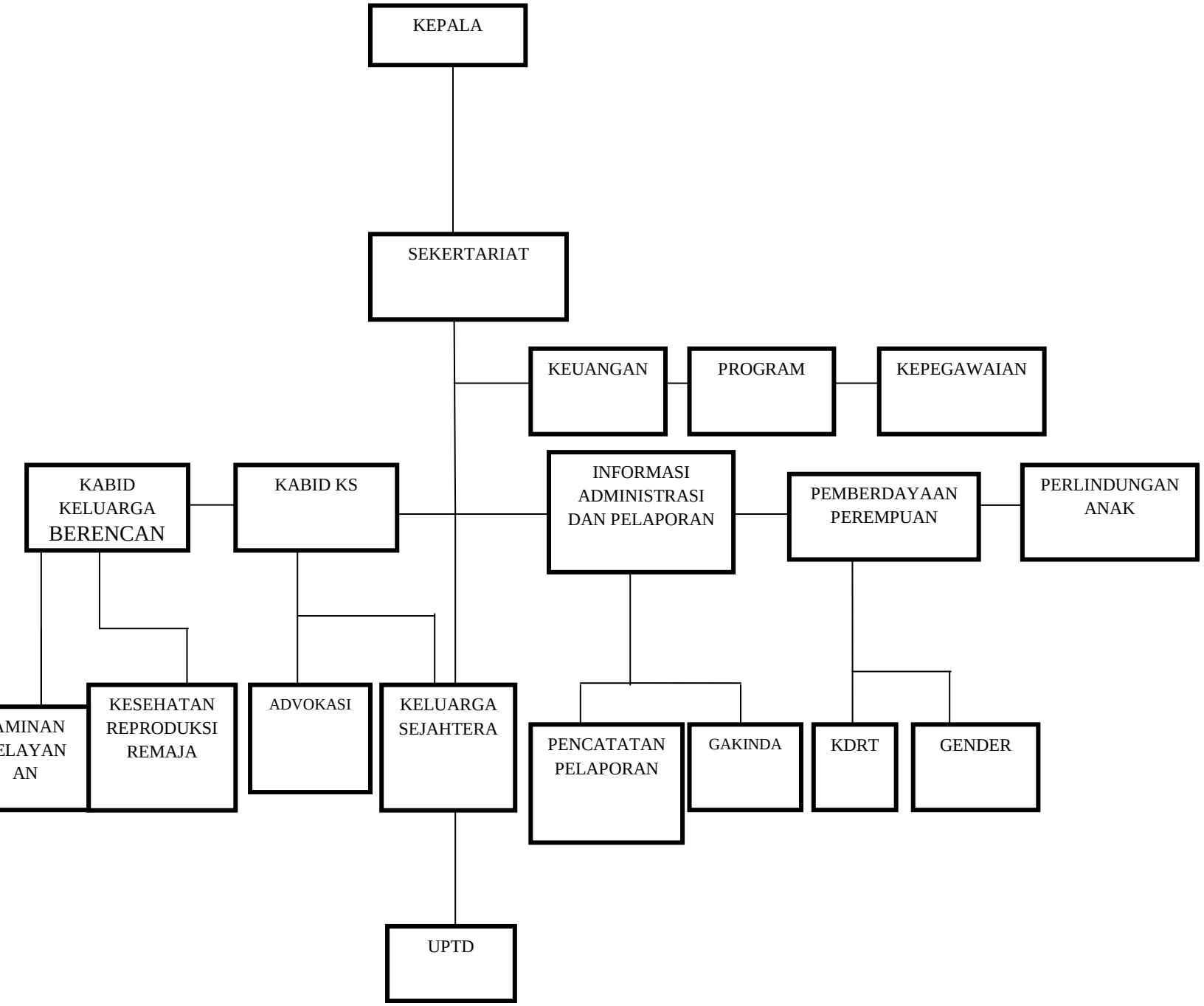
3.1.7 Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

Berdasarkan peraturan Pemda Kabupaten Bandung, bahwa menjelaskan bagaimana fungsi, serta tujuan dari masing–masing bidang yang bernaung di bawah naungan badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bandung menjelaskan, struktur organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut :

Gambar 3.3

Gambar Struktur Organisasi

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan



Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

3.1.8 Tugas dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. Terbagi atas :

1. Pimpinan adalah Kepala Badan.
2. Pembantu Pimpinan adalah sekertariat Subag.
3. Pelaksana ialah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok jabatan fungsional.

A. Tugas dan Fungsi dari Kepala Badan

Kepala Badan, mempunyai tugas yakni membantu Bupati Kabupaten Bandung, dalam mengendalikan, memimpin, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan meliputi bidang Analisa dan Informasi, Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan.

Fungsi dari kepala badan di dalam melaksanakan tugasnya ialah :

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah.
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan kabupaten bandung.
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional.
4. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga atau instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan.
5. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai badan.
6. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.
7. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja badan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

B. Tugas Dan Fungsi Sekertaris Badan

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, serta Keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta renstra badan.
2. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan badan berdasarkan pada visi dan misi badan.
3. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sekretariat.
4. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup badan.
5. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian badan.
6. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris badan.
7. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan.
8. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan.

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan.
10. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Badan secara berkala.

C. Tugas dan Fungsi dari Kepala Bidang Keluarga :

Bidang kepala bidang keluarga mempunyai tugas mengkoordinasikan dengan pihak lapangan terkait dengan kepelayanan khususnya bidang keluarga ini menangani jaminan pelayanan dan kesehatan reproduksi remaja. Entah itu terkait dengan pelayanan publik mengenani program Keluarga Berencana, maupun program sosialisasi mengenani kesehatan reproduksi pada kalangan remaja, dengan memberikan suatu pemahaman menunda usia perkawinan hingga usia yang cukup dan memang betul–betul sehat dan dinyatakan layak untuk melaksanakan perkawinan dan mempunyai keturunan.

D. Tugas dan Fungsi dari Kabid Keluarga Sejahtera.

Tugas serta fungsi dari Kabid Keluarga Sejahtera ini, mempunyai dua anak cabang yaitu pada bidang advokasi dan keluarga sejahtera. Yang kedua ini akrab di sebut dengan bagian penerangan. Yaitu tidak jauh mengenai sosialisasi mengenai pentingnya KB dan bagaimana menciptkan keluarga yang sejatera. Selain itu pada bagian advokasi ini secara fungsional hampir mirip seperti humas hanya namanya saja yang diganti menjadi bidang advokasi. Advokasi sendiri bertugas untuk menciptkan suatu persepsi kepada

masyarakat akan pentingnya KB dan suatu pemahaman yang dapat di mengerti sehingga masyarakat tergerak untuk menggunakan KB.

E. Tugas dan Fungsi dari Informasi dan Pelaporan

Tugas serta fungsi dari bidang informasi dan pelaporan ialah mendata setiap warga yang belum menggunakan KB, dan mendata jumlah masyarakat yang mempunyai taraf kehidupan yang kurang layak, dihitung per KK (kepala keluarga), hampir sama dengan Catatan Sipil, pada bidang informasi dan pelaporan juga mendata masyarakat yang kurang mampu dan diberikan GAKINDA (Keluarga Miskin Daerah) untuk menjamin kesehatannya, dan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

F. Tugas dan Fungsi Pemberdayaan Perempuan serta Pemberdayaan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak serta peran serta perempuan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang.

2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai ingkup bidang tugasnya.

3. Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak serta peran serta perempuan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluargaperlindungan perempuan dan anak serta peran serta perempuan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

3.1.9 Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Gambar 3.5

Logo TNI



Sumber : http//www.google.com

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesyahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam

(DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat. Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955.

Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI atau Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya. Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enampuluhan. Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya. Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang syah oleh

G30S atau PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam situasi yang serba chaos itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen.

Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Disisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD). Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan

wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok itu dibagi 2(dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam

kecelakaan (*search and rescue*) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI sampai saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi nasional. TNI tetap pada komitmennya menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik dimasa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, sejak tahun 1998 sebenarnya secara internal TNI telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan, antara lain:

Pertama, merumuskan paradigma baru peran ABRI Abad 21. Kedua, merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI Abad 21 ketiga; pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan Pimpinan ABRI mulai 1-4-1999 sebagai Transformasi Awal. Keempat, penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 03/)/II/1999). Kelima, penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda/Wansospolda Tk-I. Keenam, penyusutan jumlah anggota F.TNI atau Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik. Ketujuh TNI tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis atau *day to day Politics*. Kedelapan, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada. Kesembilan, komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam pemilu. Kesepuluh, penataan hubungan TNI dengan

KBT (Keluarga Besar TNI). Kesebelas, revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI Abad 21. Keduabelas, perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komsos. Ketigabelas, perubahan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster).

Keempatbelas, penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim. Kelimabelas, likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI. Keenambelas, penerapan akuntabilitas publik terhadap Yayasan-yayasan milik TNI atau Badan Usaha Militer. Ketujuhbelas, likuidasi Organisasi Wakil Panglima TNI. Kedelapanbelas, penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda; Kesembilanbelas, penegasan calon KDH dari TNI sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan. Keduapuluh, penghapusan Posko kewaspadaan. Keduapuluhsatu, pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI. Keduapuluhdua, likuidasi Organisasi Kaster TNI. Keduapuluhtiga, likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP Panglima TNI No.21/ VI/ 2005. Keduapuluh empat, berlakunya doktrin TNI, Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan, Catur Dharma Eka Karma (Cadek) sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007. Sebagai alat pertahanan negara, TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara.

3.2 Metode Penelitian

Penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti akan dipaparkan dibawah ini :

3.2.1 Desain Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang pada dasarnya apa yang dianggap menarik untuk dijadikan penelitian baik tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisi, organisasi, aktifitas sosial, dan lain–lain. Salah satu alasan mengapa menuggunakan metode kualitatif ialah menggali pengalaman dan pemahan mengenai peneliti yang kita ambil untuk menggali suatu bentuk fenomena yang kadang kala sulit untuk dipahami secara memuaskan akan penelitian tersebut.

Peneliti disini mencoba untuk mendalami permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat dan memahami apa yang terjadi dari fenomena yang dialami dari subjek penelitian yang diteliti, hal itu tentu saja dimaksudkan akan pendalaman dari suatu bentuk permasalahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Yang pada dasarnya seorang peneliti meneliti apa yang dianggapnya menarik baik itu berupa tingkah laku, sejarah, kegiatan sosial dan lain–lain. Dan yang mendasari alasan seorang peneliti menggunakan metode kualitatif ialah pengalaman yang dijadikan oleh peneliti untuk

menemukan sesuatu yang bersifat fenomal dan mencoba untuk memahami serta menemukan apa yang tersembunyi dibalik hal yang fenomenal tadi, yang memang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Definisi penelitian kualitatif menurut Moleong adalah :

> "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2000)".

Pada penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman akan apa yang sifatnya umum akan kenyataan sosial bedasarkan kenyataan sosial dari prespektif partisipan. Pemahaman akan penelitian tidak serta merta datang langsung begitu saja, bahwa pemahaman penelitian akan muncul setelah melakukan analisis akan kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Pada penelitian ini, penelitian menggunakan Metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata dan apa adanya, artinya penelitian ini memang menjelaskan secara keadaan yang sesungguhnya dengan apa adanya

Pada penelitian deskriptif pada dasarnya ialah menggambarkan secara sistematis fakta maupun subjek dan karekteristik objek yang diteliti secara tepat. Hal

ini sejalan dengan pernyataan dari Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya, Metode Penelitian Komunikasi, bahwa :

> "Metode deskriptif, yaitu dengan cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam komunikan, serta situasi-situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan fenomena secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat". (Rakhmat, 2002:22).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa metode seperti berikut ini :

3.2.2.1 Studi Pustaka

Jika kita memahami secara seksama mengenai apa itu studi pustaka, bahwa studi pustaka ialah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi atau data yang relevan dengan topik atau permasalah yang akan atau sedang diteliti.

Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, serta laporan penelitian yang sudah pernah dilakukan, karya ilmiah, Koran yang disertai dengan peraturan ketetapan serta majalah, ensiklopedia dan sumber–sumber yang lainnya baik tertulis secara elektronik ataupun cetak yang pada intinya mempunyai tingkat relevan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Studi lapangan ialah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data–data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian, tindakan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Ialah suatu bentuk teknik pengumpulan data maupun suatu informasi secara tatap muka langsung ataupun langsung seperti penggunaan media telepon dalam berlangsungnya kegiatan wawancara. Wawancara secara mendalam dengan informan juga dimaksudkan agar peneliti mendapatkan suatu bentuk informasi yang lengkap dan mendalam. Wawancara mendalam atau lebih sering disebut dengan wawancara tidak berstruktur, kegiatan wawancara ini bersifat informal dimana bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden yang telah ditentukan, akan tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri responden.

2. Observasi Partisipatif

Sugiyono (2011:227) di dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang terlihat.

3.2.2.3 Internet Searching

Didalam penelitian ini penulis juga menggunakan *internet searching* dalam melakukan pengumpulan data dari penelitian yang dilakukan. Dengan menggunakan *internet searching* peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dari situs-situs ataupun *blog* yang dianggap memang membantu dalam hal kelengkapan data.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti ialah melakukan penentuan informan secara *purposive sampling*, dimana menurut Sugiyono (2010:53) mengemukakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam pertimbangan tertentu dimaksudkan *sample* atau orang yang kita jadikan narasumber tersebut memiliki penguasaaan akan objek penelitian yang sedang kita teliti, sehingga memudahkan apa yang akan kita teliti.

Dalam penelitian ini diambil beberapa individu dengan secara jelas penjabaran nya seperti dapat dilihat dibawah ini :

TABEL 3.1

INFORMAN PENELITIAN

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1.	Nopiandi	27 Tahun	TPD (Tenaga Pembantu Daerah)

3.	Dedi Kusmiadi	49 Tahun	Bamin Komsos
4.	Asep Soma	52 Tahun	KA UPT KBPP

(sumber : Penulis 2012)

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal didalam penelitian ini peneliti telah menentukan *key informan* atau informan kunci, dalam hal ini informan kunci tersebut telah memiliki pengalaman dan waktu kerja yang terbilang sudah lama di bidang Keluarga Berencana dan kegiatan TMKK tersebut. Untuk mengenal lebih dalam tentang *key informan* tersebut maka peneliti menjabarkannya sebagai berikut :

Tabel 3.2

Key Informan Penelitian

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1.	Neneng	32 Tahun	Ibu Rumah Tangga

(sumber : Penulis 2012)

3.2.4 Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display*, dan *conclusion drawing/verivication.*

Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis dan pengolahan data sebagai berikut :

1. *Data Collection*, pemeriksaan kelengkapan, pengumpulan dan kesempurnaan data serta kejelasan data.

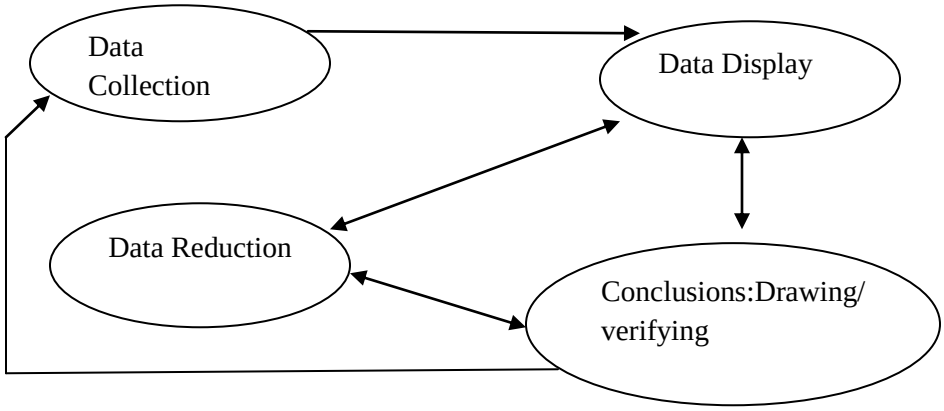
2. *Data Reduction,* merupakan suatu bentuk pengorganisasian data dari hasil data yang telah dikumpulkan dengan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, menajamkan, membuang data yang tidak perlu, yang pada intinya pengorganisasian suatu bentuk data.

3. *Data Display* , yaitu memperlihatkan data dari hasil reduksi terlebih dahulu.

4. *Conclusion drawing* atau *verification*, kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan menggambarkan data yang sudah didapatkan dan di verivikasikan dari dara–data yang sudah di peroleh oleh peneliti.

Gambar 3.4

Komponen-Komponen di dalam analisis data kualitatif



Sumber : Sugiyono, 2011:24

3.2.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilaksanakan di wilayah sekitar kabupaten bandung. Terutama di Kecamatan Cimaung yang menjadi lokasi atau tempat yang dijadikan tempat objek penelitian. Sedangkan untuk objek Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, bertempat di Jalan Raya Soreang Km.17 Kabupaten Bandung.

3.2.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dilaksanakan dari Bulan Februari 2012 sampai dengan Bulan Juli 2012. Waktu penelitian tersebut merupakan suatu bentuk pedoman dan rincian dari peneliti dalam hal melakukan observasi partisipatif dan persiapan-persiapan lainnya dalam penelitian.

Maka dari itu untuk lebih jelas mengenai waktu dari peneliti,dalam hal ini menjabarkan ke dalam bentuk tabel pedoman observasi sebagai berikut :

3.2.5 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu tringulasi data untuk menguji keabsahan data. Menurut Moleong (2007:330), tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Tringulasi data merupakan suatu proses dalam menentukan aspek dari segi kebenarannya dari informasi yang diperoleh kemudian data tersebut di susun ke dalam suatu penelitian. Maka dari hal itu peneliti menggunakan beberapa macam cara untuk mendapatkan kebenaran suatu data melalui :

1. Mengajukan berbagai macam jenis dan variasi pertanyaan.
2. Mengecek dengan berbagai sumber dari berbagai data, dan
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan. (Moleong, 2010:332)

Tabel 3.2 Rencana Penelitian

NO	KEGIATAN	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2.	Penulisan BAB I																								
	Bimbingan																								
3.	Penulisan BAB II Dan BAB III																								
	Bimbingan																								
4.	Seminar Usulan Penelitian																								
5.	Bimbingan																								
6.	Penulisan Bab 4 dan 5																								
7.	Bimbingan																								

8.	Pengumpulan Data																							
9.	Wawancara																							
10.	Bimbingan																							
11.	Penyusunan Bab																							
12.	Sidang Kelulusan																							

Sumber Peneliti 2012